



ISSN:2338-2554

E-ISSN: 2809-0691

WIDYA PUBLIKA

JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

PERAN STRATEGIS ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DALAM PENGUATAN SOSIAL BUDAYA DI INDONESIA

**Andi Mukti Ali¹, Mochamad Rustu Ferdiwan², Muhammad Miftah Babil Yasar³, Siti
Nurul Falah⁴, Weky Agesty⁵**

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Email: andimukti222@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Email: mrferdiwan123@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Email: abilyasar04@gmail.com

⁴ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Email: sitinurulfalah935@gmail.com

⁵ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Email: wekyagesty028@gmail.com

Abstract

This article examines the strategic role of development administration in Indonesia's socio-cultural context, characterized by ethnic diversity, traditions, and local values. Development administration is not merely understood as a bureaucratic mechanism, but as a governance system that determines the success of development planning, implementation, monitoring, and evaluation oriented towards social and cultural sustainability. Within this framework, development administration functions to ensure that the development process is systematic, measurable, accountable, and able to respond to community needs. The context of globalization that drives rapid social change demands a development administration that is able to maintain a balance between modernization and the preservation of cultural identity. Development administration plays a crucial role in ensuring that development emphasizes not only economic and infrastructure aspects but also pays attention to strengthening cultural values, social cohesion, and community empowerment. Community-based development is highly relevant because public participation, a sense of ownership, and strengthening social capacity have been proven to contribute to the success of development programs. A case study of the National Community Empowerment Program (PNPM) demonstrates the effectiveness of a participatory approach in increasing community independence and collaboration. The construction of the Bangkinang-Pekanbaru Toll Road illustrates the importance of development governance that is sensitive to social impacts. E-procurement reform demonstrates administrative modernization in increasing transparency and accountability. These findings confirm that adaptive, professional, participatory development administration based on the principles of good governance is a crucial foundation for creating

inclusive, sustainable, and relevant socio-cultural development that meets the needs of the Indonesian people.

Keywords: *development administration, socio-cultural, national development, public policy, community participation*

Abstrak

Artikel ini mengkaji secara mendalam peran strategis administrasi pembangunan dalam konteks sosial budaya Indonesia yang ditandai oleh keragaman etnis, tradisi, dan nilai lokal. Administrasi pembangunan tidak hanya dipahami sebagai mekanisme birokratis, tetapi sebagai sistem tata kelola yang menentukan keberhasilan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan sosial dan budaya. Dalam kerangka ini, administrasi pembangunan berfungsi memastikan bahwa proses pembangunan berlangsung secara sistematis, terukur, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Konteks globalisasi yang mendorong perubahan sosial yang cepat menuntut adanya administrasi pembangunan yang mampu menjaga keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian identitas budaya. Administrasi pembangunan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menekankan aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan penguatan nilai budaya, kohesi sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan berbasis masyarakat menjadi sangat relevan karena partisipasi publik, rasa memiliki, serta penguatan kapasitas sosial terbukti berkontribusi pada keberhasilan program pembangunan. Studi kasus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) menunjukkan efektivitas pendekatan partisipatif dalam meningkatkan kemandirian dan kolaborasi komunitas. Pembangunan Jalan Tol Bangkinang–Pekanbaru menggambarkan pentingnya tata kelola pembangunan yang sensitif terhadap dampak sosial. Reformasi e-procurement menunjukkan modernisasi administrasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Temuan ini menegaskan bahwa administrasi pembangunan yang adaptif, profesional, partisipatif, dan berbasis prinsip *good governance* merupakan fondasi penting bagi terciptanya pembangunan sosial budaya yang inklusif, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Kata kunci: administrasi pembangunan, sosial budaya, pembangunan nasional, kebijakan publik, partisipasi Masyarakat

A. PENDAHULUAN

Administrasi pembangunan menjadi fokus utama dalam kajian ini karena memiliki peran yang sangat strategis dalam mengelola proses pembangunan sosial budaya di Indonesia. Administrasi pembangunan dipahami sebagai suatu sistem yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keberlanjutan kehidupan sosial budaya (Siagian dalam Engkus, 2018). Konseptualisasi ini menempatkan administrasi pembangunan tidak sekadar sebagai perangkat teknokratis, melainkan sebagai mekanisme pengelolaan tata kelola pembangunan yang sarat dengan nilai, struktur kekuasaan, dan kepentingan sosial-politik. Administrasi pembangunan berfungsi mengarahkan bagaimana kebijakan publik diterjemahkan ke dalam tindakan yang nyata, terukur, dan berdampak langsung pada masyarakat.

Karakteristik Indonesia sebagai negara yang multietnis, multikultural, serta kaya tradisi menjadikan tantangan administrasi pembangunan semakin kompleks. Pembangunan sosial budaya bukan hanya berkaitan dengan pengadaan infrastruktur atau pelayanan publik, tetapi juga menyentuh dimensi identitas, struktur sosial, nilai-nilai lokal, serta sistem simbolik yang hidup dalam masyarakat. Administrasi pembangunan dituntut mampu merespons kompleksitas tersebut melalui tata kelola yang sistematis, akuntabel, fleksibel, dan berbasis bukti agar pembangunan tidak menghadirkan disrupsi sosial dan tidak memarginalkan kelompok tertentu.

Konsep administrasi pembangunan dalam kerangka ini diposisikan sebagai instrumen strategis yang menghubungkan kebijakan negara dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Administrasi tidak hanya berfungsi menjalankan keputusan pemerintah, tetapi juga berperan sebagai mediator, fasilitator, dan katalisator pembangunan agar proses pembangunan berlangsung inklusif, partisipatif, dan demokratis. Efektivitas administrasi pembangunan berimplikasi langsung pada tingkat penerimaan kebijakan oleh masyarakat, keberlanjutan program, serta kualitas hasil pembangunan yang dicapai.

Realitas empiris menunjukkan bahwa sejumlah program pembangunan sosial budaya di Indonesia belum berjalan optimal akibat lemahnya tata kelola administrasi pembangunan. Berdasarkan laporan Ombudsman RI tahun 2021, masih dijumpai program pelestarian budaya yang tidak mencapai sasaran karena lemahnya koordinasi lintas sektor, minimnya keterlibatan masyarakat lokal, serta rendahnya akuntabilitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama sering kali terletak bukan pada substansi kebijakan, tetapi pada pengelolaan administrasi pembangunan yang belum efektif dan adaptif terhadap konteks sosial.

Urgensi penguatan administrasi pembangunan semakin meningkat di tengah arus globalisasi, modernisasi, dan digitalisasi yang berpotensi menciptakan homogenisasi budaya serta mengikis identitas lokal. Pembangunan yang hanya menekankan aspek ekonomi tanpa memperhatikan dimensi sosial budaya berisiko melahirkan krisis identitas, ketimpangan sosial, dan melemahnya kohesi sosial masyarakat. Administrasi pembangunan dibutuhkan sebagai mekanisme pengendali yang memastikan pembangunan tetap selaras dengan nilai budaya nasional dan lokal serta mampu menciptakan keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian tradisi.

Kerangka teoritis kajian ini mengacu pada Engkus (2018) yang menjelaskan bahwa administrasi pembangunan terdiri atas empat dimensi fundamental, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dimensi perencanaan berperan memastikan arah pembangunan jelas dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Dimensi pelaksanaan memastikan kebijakan dapat dijalankan secara efektif. Dimensi pengawasan menjamin akuntabilitas dan transparansi, sedangkan dimensi evaluasi memberikan dasar perbaikan berkelanjutan. Keempat dimensi tersebut menjadi alat analisis untuk menilai bagaimana administrasi pembangunan berfungsi dalam mengelola pembangunan sosial budaya.

Pendekatan middle-range theory digunakan untuk menjembatani relasi antara kebijakan nasional dengan respons lokal masyarakat, karena pembangunan sosial budaya selalu berada dalam relasi dialektis antara kekuatan negara dan dinamika masyarakat. Perspektif pembangunan berkelanjutan sebagai grand theory menjadi dasar teoretis yang menekankan integrasi dimensi ekonomi, sosial, dan budaya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Integrasi perspektif ini memungkinkan analisis pembangunan dilakukan secara komprehensif, tidak parsial, dan berbasis refleksi ilmiah.

Penelitian-penelitian terdahulu memperkuat signifikansi administrasi pembangunan terhadap keberhasilan program sosial budaya. Studi Mahendra dan Afra (2022) menjelaskan bahwa reformasi administrasi melalui sistem e-procurement mampu meningkatkan efisiensi tata kelola dan memperkuat akuntabilitas pembangunan publik. Kajian Gusti dan Oktavia (2014) terhadap PNPM menunjukkan bahwa pembangunan berbasis partisipasi masyarakat efektif menurunkan resistensi sosial, meningkatkan legitimasi kebijakan, dan memperkuat penerimaan program pembangunan. Temuan tersebut memberikan bukti bahwa kualitas administrasi pembangunan memiliki korelasi langsung dengan keberhasilan implementasi program.

Kontribusi akademik kajian ini terletak pada integrasi antara pendekatan teoritis dan studi kasus aktual sehingga memberikan pemahaman komprehensif mengenai administrasi pembangunan sosial budaya di Indonesia. Analisis diarahkan pada bagaimana administrasi pembangunan dapat berperan sebagai instrumen strategis dalam menjaga nilai budaya lokal, memperluas partisipasi masyarakat, memperkuat transparansi, serta meningkatkan efektivitas tata kelola pembangunan.

Kontribusi praktis kajian ini diharapkan menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan. Administrasi pembangunan perlu diperkuat melalui reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas birokrasi, digitalisasi tata kelola, penguatan transparansi, serta perluasan ruang partisipasi masyarakat. Administrasi pembangunan yang partisipatif, inklusif, adaptif, dan berbasis nilai budaya lokal merupakan kunci utama untuk mewujudkan pembangunan sosial budaya yang berkelanjutan, berkeadilan, dan relevan dengan kebutuhan bangsa Indonesia.

B. LITERATURE REVIEW

Administrasi pembangunan memiliki peran strategis dalam memperkuat nilai-nilai sosial budaya masyarakat melalui pelibatan aktif komunitas lokal pada tahapan perencanaan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Dwiyanto (2006) menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang partisipatif merupakan landasan penting bagi efektivitas dan keberlanjutan pembangunan. Administrasi publik yang responsif dan adaptif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat lebih mampu mengakomodasi kebutuhan riil warga, memperkuat legitimasi kebijakan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Relevansi pendekatan partisipatif semakin tinggi pada era desentralisasi, karena pemerintah daerah memiliki kewenangan luas untuk merumuskan kebijakan berbasis lokalitas dan karakter kultural masyarakatnya.

Konteks Indonesia menunjukkan masih adanya tantangan signifikan dalam integrasi aspek sosial budaya ke dalam proses pembangunan. Globalisasi, urbanisasi, industrialisasi, dan penetrasi budaya modern kerap memunculkan tekanan terhadap keberlangsungan nilai-nilai budaya lokal. Nasikun (2007) mengingatkan bahwa pembangunan yang tidak disertai pelestarian budaya berpotensi menimbulkan disorientasi identitas dan melemahkan karakter bangsa. Kebijakan pembangunan perlu menempatkan budaya sebagai sumber daya strategis yang memiliki nilai sosial, ekonomi, politik, dan ideologis, bukan sekadar ornamen simbolik. Peluang penguatan dimensi budaya semakin terbuka melalui implementasi otonomi daerah yang memungkinkan lahirnya kebijakan pembangunan berbasis kearifan lokal dan partisipasi komunitas adat.

Kajian akademik menunjukkan bahwa pembangunan yang memperhatikan dimensi sosial budaya memiliki tingkat keberhasilan jangka panjang yang lebih tinggi. Kartodirdjo (1993) menegaskan bahwa pendekatan pembangunan berbasis pemberdayaan dan budaya cenderung lebih diterima serta lebih berkelanjutan. Tambunan (2012) menyatakan bahwa pembangunan inklusif yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan budaya lebih efektif dalam menjawab kompleksitas persoalan masyarakat. Peran administrasi pembangunan karenanya tidak hanya diukur dari capaian program secara teknis, tetapi juga dari kontribusinya dalam memperkuat jati diri bangsa, menjaga kohesi sosial, serta melestarikan nilai-nilai budaya di tengah arus perubahan global.

C. METHODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research) sebagai strategi utama pengkajian. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif terhadap fenomena administrasi pembangunan dalam konteks sosial budaya melalui analisis mendalam terhadap berbagai sumber ilmiah. Sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder, meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku-buku akademik, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi pemerintah, serta laporan lembaga internasional yang relevan dengan isu administrasi pembangunan, tata kelola pemerintahan, dan dinamika sosial budaya.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang sistematis untuk memperoleh referensi yang kredibel dan mutakhir. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif dengan cara mengidentifikasi konsep-konsep utama, membandingkan berbagai pandangan teoretis, serta menginterpretasikan temuan studi kasus yang telah diterapkan di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana administrasi pembangunan berfungsi dalam mengelola, menopang, serta memperkuat dimensi sosial budaya dalam praktik pembangunan.

Pendekatan kualitatif-deskriptif dipandang relevan karena artikel ini bersifat eksploratif dan konseptual, bukan untuk menguji hipotesis secara kuantitatif, melainkan untuk menggali kedalaman makna, kerangka teori, dan pengalaman empiris yang berkaitan dengan administrasi pembangunan. Fokus utama penelitian ini terletak pada upaya memadukan landasan teoretis

dengan bukti-bukti empiris dari berbagai praktik pembangunan di Indonesia, sehingga diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif, reflektif, dan memiliki kontribusi akademik terhadap pengembangan wacana administrasi pembangunan dalam ranah sosial budaya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Administrasi pembangunan dipahami sebagai suatu proses yang bersifat sadar, terencana, sistematis, dan terarah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, termasuk pada ranah sosial budaya. Konseptualisasi administrasi pembangunan sebagaimana dikemukakan Siagian dan Tjokroamidjojo menggarisbawahi bahwa administrasi pembangunan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pemerintahan, tetapi melibatkan dimensi strategis yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi secara berkelanjutan (Engkus, 2018). Administrasi pembangunan bekerja di dalam suatu ekosistem yang dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta infrastruktur kelembagaan (Syafari, 2023). Kualitas interaksi antarfaktor tersebut menentukan tingkat keberhasilan pembangunan, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki kompleksitas sosial budaya tinggi.

Pembangunan sosial budaya bertujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, bermartabat, dan berkarakter melalui penguatan nilai, norma, serta identitas sosial. Fokus pembangunan sosial budaya meliputi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, penguatan program keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pelestarian kebudayaan, penguatan pemuda, serta pembinaan olahraga. Pembangunan sosial budaya juga berfungsi membangun ketahanan sosial masyarakat agar mampu menghadapi tekanan perubahan global, termasuk penetrasi budaya asing dan transformasi gaya hidup (Tb, 2019). Dimensi keberhasilan pembangunan sosial budaya tidak hanya diukur melalui indikator kuantitatif, tetapi juga dari sejauh mana nilai, identitas, serta warisan budaya tetap hidup dan diterima generasi muda.

Peran administrasi pembangunan dalam pembangunan sosial budaya menempati posisi strategis karena administrasi berfungsi sebagai penentu arah kebijakan, instrumen implementasi, serta pengendali proses pembangunan agar selaras dengan karakter masyarakat. Administrasi pembangunan tidak hanya berperan sebagai alat pengaturan formal, tetapi juga sebagai penggerak transformasi sosial yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya. Kepekaan terhadap dinamika sosial, kemampuan memahami aspirasi masyarakat, serta kompetensi teknokratis birokrasi menjadi prasyarat bagi efektivitas peran administrasi pembangunan.

Partisipasi masyarakat menjadi aspek fundamental dalam administrasi pembangunan sosial budaya. Administrasi pembangunan yang mengedepankan pendekatan *bottom-up* mampu menghadirkan kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Pelibatan masyarakat perlu dilakukan tidak hanya pada tahap konsultasi, tetapi pada seluruh tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi, hingga pengawasan. Partisipasi masyarakat menciptakan rasa kepemilikan (*sense of belonging*), memperkuat legitimasi kebijakan, serta meningkatkan keberlanjutan program pembangunan. Sinergi antarsektor dan antarlevel pemerintahan merupakan elemen krusial dalam administrasi pembangunan sosial budaya. Administrasi pembangunan berperan sebagai mekanisme koordinasi yang menghubungkan kebijakan pemerintah pusat dengan implementasi di tingkat daerah. Karakter masyarakat Indonesia yang heterogen menuntut penyesuaian kebijakan nasional dengan konteks lokal agar tidak menimbulkan resistensi sosial. Administrasi pembangunan berfungsi memastikan harmonisasi kebijakan makro dengan kebutuhan mikro masyarakat sehingga kebijakan menjadi realistis, kontekstual, dan dapat diterima.

Adaptivitas administrasi pembangunan terhadap perubahan global menjadi keharusan dalam konteks sosial budaya kontemporer. Globalisasi, digitalisasi, urbanisasi, serta perubahan struktur sosial menciptakan tantangan baru yang memerlukan respons kebijakan yang cepat dan relevan. Administrasi pembangunan perlu memfasilitasi kebijakan perlindungan budaya lokal melalui sistem regulasi, pendidikan publik, dokumentasi budaya, digitalisasi warisan budaya, serta penguatan ekosistem kebudayaan. Kapasitas inovasi kebijakan menjadi faktor penting agar pembangunan sosial budaya tidak tertinggal dari perkembangan zaman. Kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia birokrasi menjadi prasyarat keberhasilan administrasi pembangunan sosial budaya. Administrasi pembangunan berperan memperkuat profesionalisme aparatur melalui peningkatan kompetensi, pembenahan tata kelola organisasi, serta penegakan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Banyak kegagalan program sosial budaya di Indonesia berkaitan dengan lemahnya koordinasi birokrasi, rendahnya integritas aparatur, serta terbatasnya kapasitas kelembagaan. Penguatan administrasi pembangunan menjadi langkah strategis untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif.

Peran edukatif administrasi pembangunan memberikan kontribusi penting dalam pembentukan karakter masyarakat. Administrasi pembangunan tidak sekadar mengelola kebijakan, tetapi juga membentuk orientasi nilai sosial melalui kebijakan pendidikan, kurikulum berbasis lokal, penguatan media literasi budaya, serta pembinaan komunitas budaya. Administrasi pembangunan berfungsi sebagai instrumen pembentukan identitas nasional, penanaman nilai kebangsaan, serta penguatan kesadaran budaya generasi muda. Peran administrasi pembangunan meliputi fungsi perencanaan, koordinasi, pengelolaan

sumber daya, dan pengawasan dalam pembangunan sosial budaya. Perencanaan pembangunan yang responsif harus berbasis data, riset sosial, serta nilai kearifan lokal. Koordinasi diperlukan untuk menghindari fragmentasi kebijakan lintas sektor. Pengelolaan sumber daya mencakup pengalokasian anggaran yang proporsional, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi digital. Sistem pengawasan dan evaluasi berbasis transparansi diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah penyimpangan. Keseluruhan uraian tersebut menunjukkan bahwa administrasi pembangunan memegang posisi sentral dalam keberhasilan pembangunan sosial budaya di Indonesia. Administrasi pembangunan yang partisipatif, adaptif, profesional, berintegritas, dan berbasis nilai budaya lokal menjadi fondasi utama bagi terwujudnya pembangunan sosial budaya yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Studi mengenai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) menunjukkan bagaimana administrasi pembangunan yang partisipatif mampu menghasilkan dampak sosial yang signifikan. PNPM dirancang sebagai inisiatif pembangunan berbasis masyarakat di mana masyarakat ditempatkan sebagai subjek utama, bukan sekadar objek pembangunan. Pelibatan masyarakat berlangsung sejak tahap identifikasi masalah, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi hasil pembangunan. Pola ini menciptakan peningkatan kapasitas sosial, penguatan kelembagaan masyarakat lokal, dan pengembangan kemandirian kolektif. Keberhasilan PNPM tidak hanya terukur melalui hasil fisik pembangunan, tetapi juga dalam peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya, menyelesaikan persoalan secara partisipatif, dan menjaga keberlanjutan program. Temuan Gusti dan Oktavia (2014) menegaskan bahwa PNPM merupakan praktik administrasi pembangunan yang efektif dalam mengurangi resistensi sosial, memperluas partisipasi publik, dan memperkuat efektivitas kebijakan pembangunan di tingkat lokal.

Kasus pembangunan Jalan Tol Bangkinang–Pekanbaru memberikan ilustrasi mengenai bagaimana proyek infrastruktur berskala nasional dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal ketika dikelola melalui administrasi pembangunan yang efektif. Proyek ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan konektivitas wilayah, tetapi juga memicu pertumbuhan ekonomi sektor riil seperti usaha mikro, kecil, dan menengah. Administrasi pembangunan dalam proyek ini menunjukkan kemampuan koordinasi antarpemerintah pusat dan daerah, pihak swasta, serta masyarakat terdampak, sehingga proses pembangunan berjalan relatif kondusif. Dampak ekonomi terlihat dari meningkatnya kunjungan wisatawan, bertambahnya omzet pelaku usaha kuliner, tumbuhnya sektor jasa dan logistik lokal, serta peningkatan aktivitas ekonomi kawasan di sekitar jalur tol. Issue et al.

(2024) menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut mencerminkan pentingnya administrasi pembangunan dalam menyinergikan kebijakan infrastruktur makro dengan penguatan ekonomi mikro masyarakat.

E. KESIMPULAN

Implementasi reformasi e-procurement menjadi contoh lain bagaimana inovasi administrasi publik berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola pembangunan. Sistem e-procurement dirancang untuk menggantikan praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah secara manual yang selama ini rentan terhadap penyimpangan, korupsi, dan inefisiensi. Digitalisasi pengadaan menciptakan proses yang lebih transparan, terukur, akuntabel, dan dapat dipantau publik. Proses administrasi menjadi lebih cepat, biaya operasional dapat ditekan, dan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat secara signifikan. Mahendra dan Afra (2022) membuktikan bahwa reformasi e-procurement berperan penting dalam memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan serta memperkuat integritas sistem administrasi pembangunan. Studi ini menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga memperkuat fondasi *good governance* dalam penyelenggaraan pembangunan di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2022). Laporan evaluasi RPJMN bidang sosial budaya. Jakarta: Bappenas.
- Dadang Solihin. (2021). Administrasi pembangunan. Jakarta: Jakad Media Publishing.
- Dwi, A. (2023). Sosial budaya, pengertian dan perannya. Diakses dari <https://www.umsu.ac.id>
- Engkus. (2018). Perspektif administrasi pembangunan: Menuju ke arah konvergentif. JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8(2), 190–201. <https://doi.org/10.31289/jispo.v8i2.1234>
- Gusti, W. D., & Oktavia, A. (2014). Etika pembangunan Terminal Bingkuang di Kota Padang. Padang: Universitas Andalas.
- Issue, V., Akbar, R., Yetti, D., Rahmayani, M., Yelmi, H., & Kaido, B. (2024). Analisis dampak pembangunan infrastruktur terhadap pendapatan rumah makan dan usaha oleh-oleh (Studi kasus Jalan Tol Bangkinang–Pekanbaru). Jurnal Teknik Industri Terintegrasi, 7(2), 867–879.

- Kemendikbudristek. (2023). Data pelestarian budaya tak benda Indonesia. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kementerian Keuangan. (2023). Outlook dana transfer ke daerah dan dana desa. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Mahendra, W., & Afra, S. A. (2022). Pengadaan elektronik dan reformasi administrasi: Studi kasus di Korea Selatan, Indonesia, dan India. *Jejaring Administrasi Publik*, 14(1), 1–21.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2021). Laporan tahunan pengawasan sektor kebudayaan. Jakarta: ORI.
- Permendikbud No. 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal. (2014). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Syafari, M. R. (2023). Administrasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Banjarmasin: CEEP - ULM.
- Tb, H. (2019). Pembangunan di bidang sosial budaya. Diakses dari <https://www.scribd.com>